

**PEMBERDAYAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT MELALUI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN KELUN
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

Elga Jatu Nataya
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email : elgajatu@gmail.com

Supriyadi S.N.
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email : Supriyadi.sn.su@gmail.com

Received: 16-06-2017

Accepted: 20-07-2017

Online Published: 21-08-2017

Abstract

The objective of research is to describe the empowerment strategy and process and the form of mindset, attitude, and behavioral change among the beneficiary family after the presence of *Program Keluarga Harapan* (The Family Hope Program) empowerment by other family in Kelurahan Kelun of Kartoharjo Sub District of Madiun City. Empowerment conducted included *Family Development Session*, training, and Joint Venture Group. This qualitative research employed case study approach. Data collection was carried out using interview and field observation. Informant was selected using purposive sampling technique. Data validation was carried out using data triangulation. Data analysis was conducted using data reduction, data display, and conclusion drawing stages.

The result shows that empowerment strategy including participation, motivation and partnership ran close to the specified target, but some dimensions still need improvement to make all elements run optimally. Empowerment process encountered such constraints as implementation and funding time, despite not inhibiting the *Program Keluarga Harapan* empowerment in Kelurahan Kelun of Kartoharjo Sub District of Madiun City. The change of mindset, attitude, and behavior among the beneficiary family can be seen from the change of action, the awareness of getting out of poverty condition they encounter. However, it was well established that some beneficiary family did not show the change in their mindset and behavior. Nevertheless, independent attitude will results from this empowerment.

Keywords: Empowerment, Beneficiary Family, Program Keluarga Harapan

A. Pendahuluan

Salah satu isu global dalam SDG's penting yang perlu ditangani dalam kurun waktu 15 tahun kedepan adalah kemiskinan. Pemberantasan kemiskinan juga menjadi prioritas utama untuk memenuhi target pembangunan sebuah negara, untuk itu masalah kemiskinan bukan hanya menghambat tapi bila tak segera diselesaikan akan mempengaruhi kondisi ekonomi bahkan sosial pada masyarakatnya.

Pengertian mengenai kemiskinan memang relatif bahwa masyarakat tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Untuk itu masalah kemiskinan memerlukan penanganan yang tepat sehingga dapat dituntaskan dengan baik dan tanpa menimbulkan penyebab lanjutan dari kemiskinan tersebut. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemeran paling penting dalam menangani masalah kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah dapat mengupayakan program yang sesuai dengan keadaan kemiskinan yang dialami oleh Indonesia, sehingga dapat dengan tepat dan cepat mengatasi masalah tersebut.

Keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya dapat di kategorikan sebagai keluarga miskin. keluarga miskin adalah orang-orang yang terhubung melalui darah, pernikahan, atau adopsi dan tinggal bersama, dimana rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masing-masing orang tersebut berada di bawah garis kemiskinan yang membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum untuk keperluan fisik dan kebutuhan dasar lainnya (Hanum, 2010).

Dari penjabaran fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa

keluarga miskin ini juga merupakan salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Pemberian bantuan seperti pencairan dana sangat dibutuhkan demi berlangsungnya kehidupan keluarga miskin, Selain itu pengadaan pembekalan keterampilan dengan melalui pemberdayaan juga dapat memberikan kemampuan dasar bagi keluarga. Melalui inilah nantinya dapat dijadikan sebagai pengalaman bagi para keluarga miskin untuk membentuk usaha-usaha dalam jangka panjang.

Istilah pemberdayaan memang tidak asing di Indonesia. Keluarga yang merupakan sasaran penting dalam program pemberdayaan sebenarnya merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang ada dalam kondisi kemiskinan. Jadi dengan adanya pemberdayaan ini diharapkan mampu untuk memandirikan dan memberdayakan keluarga tersebut agar dapat bertahan melewati roda perekonomian yang semakin ketat.

Dalam pemberdayaan ini biasanya masyarakat akan di beri fasilitas dan pelatihan agar menjadi lebih berdaya guna dari sebelumnya dan membuat usaha-usaha untuk menambah penghasilan keluarga. Perbaikan ekonomi dalam keluarga memang dipandang tidak mudah sehingga pemberdayaan harus dilakukan dengan berkesinambungan. Sebagai suatu proses dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (*on-going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program (Adi, 2008).

Pada tahun 2007, pemerintah lewat Kementerian Sosial membuat sebuah kerangka program untuk keluarga yaitu Program Keluarga

Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku keluarga yang kurang mendukung, upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Pada aturan awal pemberiannya sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Kemudian pada tahun 2016 komponen itu ditambah menjadi lansia berisiko tinggi dan penyandang disabilitas berat. Salah satu kota dengan penerima bantuan PKH adalah Kota Madiun. PKH hadir di Kota Madiun pada tahun 2013 sebagai salah satu program dengan basis selain pemberian bantuan tunai kepada peserta PKH yaitu ibu-ibu rumah tangga..

Pemberdayaan dalam PKH terdiri dari KPM dengan di bagi menurut kelompok-kelompok dan memiliki pendamping serta operator dalam menjalankannya. Terdapat 88 kelompok yang mendapatkan bantuan PKH di Kota Madiun. Penerima bantuan PKH di Kota Madiun di tahun 2016 sudah mencapai 1.099 keluarga. Penerima bantuan ini disebar di tiga Kecamatan besar yaitu Kartoharjo dengan jumlah penerima PKH pada tahun 2016 adalah 357 keluarga, Manguharjo terdapat 360 keluarga dan Taman yaitu 382 keluarga.

Dalam tiga Kecamatan di Kota Madiun salah satu daerah penelitian yaitu Kelurahan Kelun berada di Kecamatan Kartoharjo. Di Kelurahan Kelun sebagai daerah terpilih untuk melakukan penelitian terdapat 2 kelompok dengan jumlah keluarga penerima bantuan pada tahun 2016 adalah 50 orang. Kelurahan Kelun

dipilih untuk daerah penelitian karena pada kelompok PKH disana terdapat kemajemukan karakteristik kelompok dalam menjalankan pemberdayaan dari PKH di Kota Madiun. Dalam pemberdayaannya di PKH ini terdapat beberapa dimensi untuk melihat berjalannya program ini yaitu tingkat partisipasi KPM dalam menjalankan program pemberdayaan, motivasi, kemitraan, proses yang ada didalamnya dan perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku.

Inilah yang kemudian menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan pemberdayaan PKH. Karena PKH merupakan program yang efektif untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Selain program ini diberikan pada keluarga yang membutuhkan penanganan dalam mengentaskan kemiskinan, juga memberikan pemberdayaan yang dapat merubah pola pikir keluarga miskin. Dari perubahan inilah kemudian akan muncul inisiatif dari masyarakat untuk tidak terjebak kemiskinan dan dapat bangkit dari segala bentuk kemiskinan menuju masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi kreatif.

Pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi tawar” (Mardikanto, 2010). Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan memperkuat dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan (Demartoto, 2016).

Pendekatan Pemberdayaan digunakan karena diyakini sumber

masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan (Soetomo, 2011). Shardlow dalam Adi (2008) melihat berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Jadi pemberdayaan dapat diartikan sebagai kekuatan atau *power* yang digunakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat golongan lemah dalam hal ini masyarakat miskin, agar dapat melakukan kegiatan atau program yang lebih berdaya dan lebih memiliki kehidupan yang optimal dari sebelumnya. Pemberdayaan juga dalam rangka memaksimalkan usaha dan memberikan batu loncatan masyarakat untuk memandirikan dari segi ekonomi dan sosial.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori AGIL dan Sistem Tindakan yang disampaikan oleh Talcott Parsons. Teori tersebut menjelaskan mengenai suatu fungsi dimana kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan suatu kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan sistem, maka Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang perlu bagi semuanya. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional itu dikenal sebagai skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*). Agar dapat lestari, suatu sistem harus melaksanakan keempat fungsi yang diartikan sebagai segala kegiatan yang di arahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhandari sebuah sistem.

Kemudian lanjutan setelah menerapkan keempat imperatif fungsional dalam setiap pemberdayaan

PKH, maka langkah selanjutnya adalah menggambarkan bagaimana penggunaan AGIL tersebut. Penggambaran ini selanjutnya dijabarkan dalam *Organisme behavioral*, sistem kepribadian, sistem sosial dan terakhir adalah sistem budaya yang dirangkum dalam sistem tindakan.

Inti sistem tindakan ini sebenarnya ada pada empat sistem tindakannya. Antara sistem tindakan dengan AGIL memiliki peran masing-masing dan keterkaitan antara satu sistem dengan salah satu imperatif fungsionalnya. Untuk itu dalam pengkajian program pemberdayaan PKH melalui sistem tindakan tidak dapat dilepaskan dari peran AGIL sebagai dasar untuk menggambarkan pemenuhan kebutuhan pemberdayaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus guna mengungkap informasi pemberdayaan PKH di Kelurahan Kelun Kota Madiun. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif untuk melihat pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) yaitu keadaan pemberdayaan PKH di Kelurahan Kelun Kota Madiun yang telah dikembangkan melalui FDS, pelatihan dan KUBE.

Penelitian ini menggunakan studi kasus yaitu menurut Arikunto (2002) dalam Gunawan (2015) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. dengan keadaan yang

menarik yaitu pemberdayaan seharusnya ada pada setiap Kota maupun Kabupaten penerima PKH setelah tujuh tahun berlangsung. Namun di Kota Madiun ini dalam kurun waktu empat tahun telah merintis pemberdayaan atas inisiatif pengurus PKH dan terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Penelitian ini memilih informan menggunakan teknik pemilihan informan *purposive sampling*, dengan tujuan agar dapat diperoleh sampel yang memenuhi kriteria. Sehingga peneliti memilih kriteria informan yang nantinya mampu untuk memenuhi kebutuhan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan dalam pengambilan data, data primer diambil dari wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk menggali data secara langsung pada informan agar diperoleh data. Wawancara dilakukan dengan menggunakan *interview guide* agar peneliti dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Observasi dilakukan untuk mengamati segala aktifitas pemberdayaan PKH. Dalam data sekunder didapat melalui dokumentasi berupa foto ataupun rekaman wawancara dengan informan dan juga literatur dari tempat penelitian.

Sedangkan untuk menguji validitas data yang ada peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Sehingga data yang telah diperoleh melalui wawancara pendamping dan KPM kemudian dibandingkan dengan observasi langsung dan juga literatur yang ada. Jadi data yang diperoleh dari satu sumber dapat dibandingkan dengan sumber lain yang berbeda.

C. Hasil Dan Pembahasan

Pada dasarnya cita-cita PKH adalah untuk memberdayakan KPM

sebagai sasaran yang diberdayakan agar sejalan dengan tujuan PKH yaitu untuk memberantas kemiskinan, mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dan memutus rantai kemiskinan. Terdapat tiga unsur dalam pelaksanaan pemberdayaan PKH yaitu strategi, proses dan perubahan pola pikir, sikap, serta perilaku. Dari pemberdayaan PKH di Kelurahan Kelun rata-rata sudah memiliki kemajuan masing-masing. Walaupun terdapat beberapa kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal bisa saja dari diri masing-masing individu sendiri sedangkan faktor eksternal dapat berupa tidak adanya modal, alat maupun waktu dalam pengerjaannya.

Dalam strategi pemberdayaan PKH terdapat tiga aspek yaitu partisipasi, motivasi dan Kemitraan. Partisipasi membahas mengenai tingkat kehadiran peserta dalam pemberdayaan. Pada pemberdayaan FDS dan pelatihan jumlah peserta yang hadir sudah cukup baik yaitu hampir 98%. Namun pada pemberdayaan KUBE hanya setengah dari jumlah KPM yang mengikuti pemberdayaan dikarenakan kesibukan setiap KPM. Sedangkan motivasi setiap KPM dalam mengikuti pemberdayaan sangat ditentukan melalui kewajiban, peraturan dan dorongan dari diri sendiri untuk merubah kondisi kemiskinan. Pemberdayaan FDS dan pelatihan terdapat peraturan yang disepakati bersama, yaitu mengenai keterlambatan dan ketidakhadiran peserta. Masalah utama yang ditekankan melalui dua pemberdayaan ini adalah masalah keterlambatan KPM dalam mengikuti kegiatan.

Sedangkan pada pemberdayaan KUBE motivasi masih terlihat rendah karena pemberdayaan ini baru saja terbentuk satu tahun yang lalu. Selain itu belum ada pertemuan kelompok dan

peraturan dalam pemberdayaan mengakibatkan tidak adanya motivasi dari dalam KPM. strategi yang lain merupakan kemitraan yang dengan melaksanakan kerja sama. Kerja sama yang dibangun bekerja sama antara lain dengan Dinas Sosial Kota Madiun, Badan Perpustakaan Kota Madiun, dan pada kedepannya akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Madiun dalam rangka perijinan P.IRT produk KUBE. Beberapa segi dalam saja wajib disamakan serta diperbaiki lagi agar semua elemen pemberdayaan dapat berjalan lebih optimal.

Proses pemberdayaan ini merupakan berjalannya pemberdayaan PKH yaitu FDS, pelatihan dan KUBE serta kendala yang dihadapi dalam berjalannya pemberdayaan. Setiap pemberdayaan memiliki prosesnya masing-masing sehingga perlu penjabaran atas ketiganya.

Pemberdayaan FDS sudah berjalan hampir empat tahun dan merupakan pemberdayaan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari KPM. Walaupun awal terbentuknya masih memiliki hambatan akibat pendamping yang *resign*, tapi proses diadakannya FDS untuk menyadarkan mereka mengenai pendidikan, kesehatan dan pola pengasuhan anak berjalan dengan lancar. Setelah melalui proses pemberdayaan ini maka diharapkan KPM memiliki *mind frame* yang berbeda dari sebelum diadakan FDS ini.

Pelatihan mengenai tata boga ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama satu minggu dengan jumlah peserta mencapai 75 orang. Pada saat pelatihan tata boga ini, peserta diajarkan berbagai makanan yang terdiri dari pembuatan mie ayam, berbagai macam es dan roti. Kendala yang dihadapi peserta pelatihan antara lain adalah pemilihan waktu pelatihan

sehari penuh yaitu mulai pukul 07.00 hingga pukul 14.00 yang mengakibatkan banyaknya peserta yang terlambat.

Sedangkan pelatihan yang kedua merupakan kerja sama dengan Badan Perpustakaan Kota Madiun. Pelatihan ini berupa menjahit yang diikuti oleh sembilan orang peserta dari seluruh kelompok KPM. Proses menjahit ini diawali dengan membuat pola terlebih dahulu kemudian memotong pola tersebut dan diakhiri dengan manjahit. Selama pelatihan menjahit ini terdapat beberapa orang mengalami kendala. Proses pengerjaan menjahit yang relatif sulit dan baru bagi KPM, membuat beberapa orang tidak dapat mengikuti pelatihan ini dengan menyeluruh.

Setelah adanya pelatihan untuk peningkatan kemampuan individu kemudian pada tahun 2015 PKH membuat inisiatif untuk membentuk embrio KUBE. Pada KUBE di Kelurahan Kelun ini merupakan dua Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang digabungkan menjadi satu yaitu produksi tempe dan keripik tempe. Kendala lain yang ada dari pemberdayaan ini adalah dari teknis pelaksanaan dan belum adanya dana dari Kementerian Sosal. Sehingga hasil yang diterima oleh KPM belum dapat maksimal dan terlihat besar namun sudah dapat membantu perekonomian KPM.

Perubahan pola pikir, sikap dan perilaku dapat ditunjukkan melalui perubahan sikap dalam masing-masing KPM serta menyadari kondisi kemiskinan mereka dan keinginan mereka untuk lepas dari kemiskinan. Perubahan ini berupa keinginan menuju peningkatan ekonomi keluarga baik dari usaha sendiri maupun melalui pelatihan. Beberapa KPM telah sadar untuk mengubah pola perilaku mereka

dalam mengatasi kemiskinan sehingga berdampak pada penambahan penghasilan dalam keluarganya. Tapi tidak dipungkiri bahwa beberapa lainnya juga masih belum mampu dalam mengatasi kemiskinannya. Pemberdayaan masih terus mengalami perkembangan dengan pengarahan serta bimbingan dari PKH.

Kemandirian dari KPM sudah terlihat dari perubahan pola pikir, sikap dan perilaku serta mengalami proses keberlanjutan setiap tahunnya, namun bukan berarti KPM telah mandiri. Pendamping Kelurahan Kelun juga mengharapkan masih adanya inovasi yang dikembangkan pemerintah untuk pemberdayaan ini agar produk-produk dari pemberdayaan PKH dapat bersaing dengan produk-produk lokal lainnya. Tahap pemberdayaan masih berlangsung menuju KPM yang mandiri.

Talcott Parsons dalam Ritzer (2012) menyatakan mengenai suatu fungsi dimana kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan suatu kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan sistem, maka Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang perlu bagi semuanya. Selama perkembangannya pemberdayaan PKH mengandung unsur awal mulanya mengatur penyesuaian program dengan keadaan KPM sebagai pelaku pemberdayaan. Setelah itu PKH menemukan pemberdayaan apa yang cocok dan dapat digunakan dengan cepat serta menghasilkan pendapatan bagi KPM. Maka dalam pengerjaannya PKH mulai mengatur strategi kemudian melewati proses dari masing-masing pemberdayaan yang ada kemudian terakhir PKH dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan ini merubah pola pemikiran, sikap dan perilaku KPM. Melalui semua tahap ini PKH dapat mengetahui apakah pemberdayaan ini

sudah mengakibatkan kemandirian KPM atau belum. Semua sistem yang ada pada PKH harus dapat memenuhi kebutuhan, sehingga seperti yang dikatakan Parsons maka fungsi-fungsi tersebut harus dijalankan melalui AGIL.

Melalui analisis dari pemberdayaan PKH dari FDS, pelatihan hingga KUBE dalam fase AGIL dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan apa yang dikatakan oleh Parsons maka memudahkan dalam menganalisis apa saja yang harus dikerjakan sebelum pemberdayaan ini berlangsung. Dalam tingkatan level yang berbeda AGIL dapat menyesuaikan dengan setiap jenis pemberdayaan PKH. Penerapannya juga diterima baik oleh KPM sebagai agen yang diberdayakan. Pengerjaan pemberdayaan ini sangat diunggulkan sebagai modal perbaikan dalam kesejahteraan KPM dan peningkatan pendapatan ekonomi keluarga.

Penjelasan Parsons melalui AGIL kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam struktur tindakan umum yang menjelaskan bahwa setiap komponen dalam sistem tindakan seperti yang diasumsikan oleh Parsons yaitu menjadikan struktur masyarakat yang teratur sebagai prioritasnya yang pertama. Penggambaran ini selanjutnya dijabarkan dalam *Organisme behavioral*, sistem kepribadian, sistem sosial dan sistem budaya. Setiap sistem digambarkan langsung dan dipadankan dengan sistem AGIL. Terdapat tingkatan hierarkis dalam sistem tindakan yang menunjukkan kondisi dari sistem itu. Jika pemberdayaan PKH adalah sistem tersebut maka level paling rendah merupakan lingkungan fisik yang merupakan aspek-aspek nonsymbolik yaitu keanggotaan dalam struktur PKH yang membentuk

program pemberdayaan tersebut. Keanggotaan ini akan memberikan kontribusi terhadap berkembangnya program pemberdayaan PKH.

Sedangkan level tertinggi menurut Jacksons Toby dalam Ritzer (2012) merupakan keenderungan universal masyarakat untuk menunjuk secara simbolis kepada tragedi eksistensi manusia yang menantang kebermaknaan organisasi sosial. Tragedi ini dapat dimaknai sebagai aturan-aturan dalam PKH yang berupa hak dan kewajiban KPM. Aturan ini bersifat mengendalikan seluruh sistem yang ada didalamnya. Walaupun realitas dalam Kelurahan Kelun sendiri tingkat pelanggaran aturan dalam pemberdayaan ini sangat kecil, namun potensi itu tetap diwaspadai oleh pendamping PKH.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kelun mengenai pemberdayaan PKH dapat disimpulkan bahwa KPM sudah mulai untuk menerapkan pemberdayaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pemberdayaan PKH tidak hanya dipandang sebagai suatu keharusan tapi dapat menambah penghasilan keluarga.

Pada awalnya pemberdayaan ini memang ditujukan hanya untuk memperbaiki kualitas bidang kesehatan dan pendidikan dalam KPM. Perubahan *mind frame* atau cara berfikir adalah hal yang dasar yang ingin ditingkatkan oleh pemberdayaan PKH. KPM Kelurahan Kelun sudah mulai terdapat perubahan dalam hal itu. Peningkatan juga terjadi dalam bidang keterampilan berkat adanya pelatihan pemberdayaan PKH. Selain keterampilan, pelatihan ini juga menambah penghasilan dalam keluarga. Bentuk dukungan dalam usaha lainnya adalah KUBE yang merupakan usaha mandiri KPM

Kelurahan Kelun yaitu produksi tempe dan keripik tempe. Peran pendamping dan keinginan PKH untuk terus meningkatkan daya guna KPM sangat membantu berkembangnya setiap pemberdayaan. Meskipun dalam kenyataannya KPM belum mencapai tahap mandiri.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pt. Grafindo Persada
- Demartoto, Argyo. 2016. "Pemberdayaan Perempuan dalam Pariwisata Berbasis Komunitas" dalam Argyo Demartoto dan Siti Zunariyah (Ed.) *Wajah Pembangunan Berbasis Komunitas*. Surakarta: UNS Press
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hanum, Lathifa. 2010. "Keluarga Si Miskin" dalam Karnilawati Silalahi (Ed.) *Keluarga Indonesia Aspek Dinamika dan Zaman*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Mardikanto, Totok. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: Pertanian UNS dengan UNS Press
- Mardikanto, Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat oleh Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press)
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama

Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat. Mungkinkah Muncul Antitesisnya ?* Yogyakarta: Pustaka Belajar

Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi Dai Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern.* Yogyakarta: Pustaka Belajar